Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3 (1) (2023)

Published by: Lembaga Riset Ilmiah – Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA)

Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen

Journal homepage: https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam

Implementasi UU TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Dan Akuntansi Pajak Atas Barang Kena Pajak "Box Panel Stenlis" Pada CV Graphic Electric Tahun 2023

Yeni Elfiza Abbas[1], Darmawanto[2], Karsam[3]

Prodi Magister Akuntansi SWINS Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history
Received:
Revised:
Accepted:

Keywords:
TKDN
Akuntansi Penjualan
Pajak Pertambahan Nilai

This is an open-access article under the CC BY license.

ABSTRACT

Tujuan: untuk menganalisa penerapan UU TKDN dan Akuntansi atas Barang Kena Pajak Penjualan Box Panel Stenlis pada CV Graphic Electric
Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengamatan terhadap obyek secara langsung.
Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TKDN belum sepenuhnya diterapkan pada Perusahaan swasta, namun perusahaan telah mencatat penjualan. Pencatatan transaksi penjualan, juga sesuai dengan syarat-syarat penjualan dan harga jual disepakati dengan pelanggan. Sedangkan untuk perpajakan, perusahaan telah memilih menjadi dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang membuat faktur penjualan melalui e-faktur. Faktur pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)keluaran maupun masukan sudah sesuai dengan UU-HPP No 7 Tahun 2021. Dibulan Juli 2022 dilakukan untuk semua invoice yang telah dibuat akan di-review lagi. Jika ada invoice yang salah maka akan dibuatkan invoice revisi. Pada bulan Juli 2022, CV. Graphic Electric membayar PPN Keluaran sebesar Rp.42.570.000 dengan SPT kurang bayar.
Implikasi praktis: Manajemen perusahaan bisa menerapkan kebijakan untuk menerapkan UU TKDN dan pencatatan Pajak atas Barang Kena Pajak
Orisinalitas/nilai: Orisinalitas penelitian ini adalah implikasi UU TKDN dalam semua industri dan dampak yang mungkin timbul terhadap aspek perpajakannya

Purpose: The aim of this study is to examine how CV Graphic Electric applies the TKDN Law and Accounting for Taxable Goods when selling Stenlis Panel Boxes.
Methodology: This study employs a qualitative descriptive methodology that involves direct object observation.
Findings: The study's findings indicate that while private businesses have reported sales, the TKDN Law has not yet been fully applied in those businesses. keeping track of sales transactions while adhering to the conditions of the agreement and the price that was agreed upon with the client. In the meantime, the business generates sales invoices via e-invoice and has decided to become a Taxable Entrepreneur (PKP) for tax purposes. Value Added Tax (VAT) invoices pertaining to input and output are compliant with UU-HPP No. 7 of 2021. Every invoice that has been generated will be examined once more in July 2022. An updated invoice will be generated if the original is found to be inaccurate. CV. Graphic Electric paid IDR 42,570,000 in output VAT in July 2022 along with an unpaid SPT.
Practical implications: Company management can implement policies to implement the TKDN Law and record Tax on Taxable Goods
Originality: The originality of this research is the implications of the TKDN Law in all industries and the possible impact on tax aspects

Corresponding Author:
Karsam.
Prodi Magister Akuntansi SWINS Institut Bisnis Dan Komunikasi Swadaya, Jakarta, Indonesia.
Karsamse86@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia, TKDN telah menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa sektor industri, seperti otomotif, telekomunikasi, dan energi, sering kali diberikan target TKDN sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi. Sesuai UU No 3 Tahun 2014 dan PP No 29 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dan Badan Kebijakan Fiskal (sekarang menjadi Badan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara/BKPKAN) biasanya menetapkan kebijakan TKDN untuk sejumlah sektor dan proyek tertentu. Perusahaan atau pabrikan yang beroperasi di Indonesia diharapkan untuk mencapai tingkat kandungan dalam negeri tertentu dalam produksi mereka. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mengacu pada persentase nilai atau jumlah komponen, baik barang maupun jasa, yang diproduksi atau diberikan di dalam negeri dalam suatu produk atau proyek. TKDN menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana suatu produk atau proyek mendukung perekonomian domestik. Sebagai contoh, dalam industri otomotif, pemerintah Indonesia telah menetapkan persentase minimum TKDN untuk mobil yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri. Hal ini dapat mencakup komponen mesin, bodi, interior, dan lainnya. Pabrikan atau produsen yang mencapai atau melebihi target TKDN biasanya mendapatkan insentif atau dukungan khusus dari pemerintah. Perlu diingat bahwa kebijakan TKDN dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri. Oleh karena itu, informasi terkini dari sumber resmi pemerintah atau lembaga terkait sangat penting untuk memahami kebijakan TKDN di Indonesia pada saat ini. Menurut Koran Republika.co.id tanggal 25 oktober 2023menyatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) menilai implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) PT Rekayasa Industri (Rekind) tercepat dibandingkan Anak-Anak Perusahaan (Anper) lainnya, dalam pelaksanaan TKDN yang diterapkan perusahaan EPC (*engineering, procurement, construction*) milik bangsa itu, juga sesuai dengan prosedur dan prinsip *good corporate governance* (GCG), yang diterjemahkan dan ditetapkan ke dalam program strategis Pupuk Indonesia (PI) selaku *holding*.Untuk membuat catatan atas semua peristiwa ekonomi perlu buat catatan Akuntansi.

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran mengenai transaksi keuangan yang disusun dengan sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkaitan guna pengambilan keputusan (Eddy dan Sunarno, 2021:1).

` Prosesnya dimulai dari pencatatan, pengumpulan, penanganan, pemasukan informasi, dan pencatatan pertukaran yang berhubungan dengan keuangan, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi adalah untuk segera memberikan data terkait untuk mengatasi masalah manajer dan pekerja dalam hal pengambilan keputusan, serta kebutuhan pengambilan keputusan yang tidak terlibat dengan bisnis. (warren , et all, 2014).

Sejauh menghitung biaya penciptaan, Organisasi melibatkan strategi *full costing* dalam menentukan Harga Pokok Penjualan(HPP), yang menentukan HPP dengan mempertimbangkan semua komponen biaya produksi ke dalam HPP, yang terdiri dari biaya bahan mentah, pekerjaan langsung & biaya overhead pabrik baik yang perilakunya bersifat variabel maupun tetap (Mulyadi, 2005).

Pada Perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sangat erat kaitan antara Perpajakan dan laporan keuangan Perusahaan , Jadi setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak sudah memiliki kewajiban membayar pajak yang disetorkan kepada negara atas dasar aktifitas Produk dan Jasa yang dihasilkan pada satu periode. Salah satu jenis penilaian yang akan menambah pendapatan negara yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN berlaku atas penjualan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh importir, produsen, pedagang utama atau agen utama, pemilik merek dan paten, dan lain-lain. Dalam menghitung PPN dipisahkan menjadi dua skema, yakni PPN masukan & keluaran. Bagi para pebisnis yang melakukan pertukaran impor, baik barang / jasa kena pajak, diharapkan membayar PPN masukan.

Begitu pula pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan barang/jasa kena pajak, wajib memungut pajak keluaran. (Waluyo,2019). Sedangkan pendapat lainnya Pajak yang dikenakan guna transaksi jual beli barang & jasa dalam negeri, yang bersifat objektif & tak langsung, disebut sebagai Pertambahan Nilai (PPN) (Marsadita, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai atas CV. Graphic Electric ditentukan, disetor & dilaporkan. Penelitian ini menggunakan olahan data pajak masukan dan pajak keluaran sebagai bahan penelitian dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai metodologinya. Sejak penerapan tarif PPN 11% sejalan dengan Undang UndangHPP No. 7 Tahun 2021, penerapannya dimulai ditahun 2022. Temuan menunjukkan bahwasanya CV.Graphic Electric sudah menerapkan tarifPajak

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% pada Barang Kena Pajak dalam ini adalah produk Box panel stenlis, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 1. PPN BKP Box Panel Stenlis Tahun 2022

Jenis Barang	Biaya Overhead	Jumlah Produksi BKP	Harga Pokok Penjualan
Box Panel Stenlis	Rp.79.520.000	100 unit	Rp.650.000.000

CV.Graphic Electric sudah sesuai Undang-undang yang relevan dengan memanfaatkan PPN dalam perhitungan, setoran & pelaporan PPN. CV. Graphic Electric adalah Perusahaan yang bergerak dibidang industry pabrikasi box panel(metal Sheet) yang berdomisili di Jl.Taman Firdaus 1 No.3 Jati Asih Bekasi Selatan Jawa Barat.yang telah memiliki banyak pelanggan baik dalam maupun luar dipulau jawa .

KAJIAN TEORI

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan barang/jas merupakan upaya untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Ada delapan nilai GCG yang diterjemahkan Pemerintah termasuk program strategisnya, yaitu pengadaan berkelanjutan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kinerja rekanan, penjaminan *online,* transparansi *online,* sistem antipenyuapan, uji kelayakan, dan pengendalian gratifikasi. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan suatu aspek penting dalam hal rantai pasokan di dalam negeri. Kementerian yang bertanggung jawab pada aspek satu ini adalah Kementerian Perindustrian. TKDN memberikan pengaruh penting pada pemasaran dan pengadaan barang di masyarakat, Pengertian TKDN, secara garis besarnya adalah nilai persentase dari komponen berbagai produksi di dalam negeri. Nilai produksi tersebut terdiri dari biaya pengangkutan suatu item penawaran harga barang dan jasa.

Terdapat 3 jenis komponen perhitungan atau penilaian produk barang dan jasa TKDN. Jenis perhitungan ini ditujukan pada perusahaan yang dipersyaratkan untuk memiliki TKDN pada barang dan jasa yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan perhitungan TKDN di bawah ini:

1. Perhitungan Komponen dalam Negeri Pada Barang

Definisi barang ialah untuk setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Perhitungan TKDN barang menghitung persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, kewarganegaraan tenaga kerja, serta kepemilikan dan negara asal alat kerja dipakai. Perlu diketahui bahwa perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis barang. Jenis barang merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama. Sehingga jika perusahaan Anda memproduksi beberapa jenis barang dengan menggunakan proses produksi dan bahan baku yang berbeda-beda, maka harus dilakukan perhitungan TKDN tersendiri untuk masing-masing jenis barang tersebut.

Perhitungan Komponen dalam Negeri Pada Jasa

Perhitungan komponen TKDN jasa memperhitungkan kewarganegaraan tenaga kerja, alat & fasilitas kerja, serta jasa umum yang digunakan dalam melakukan jasa yang diperdagangkan. Biaya yang diperhitungkan ialah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*On Site*).

Perhitungan Komponen dalam Negeri Barang dan Jasa

Jenis terakhir adalah perhitungan komponen TKDN barang dan jasa yang mana kombinasi dari dua poin sebelumnya. Perhitungan komponen lokal atas bahan baku/material yang digunakan dan peralatan kerja digabungkan dengan tenaga kerja, jasa umum, konstruksi/fabrikasi, dan fasilitas kerja. Semakin banyak komponen-komponen tersebut yang berasal dari dalam negeri, maka semakin tinggi pula nilai TKDN atas produk tersebut.

PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Menurut Mardiasmo (2016:3) PPN dapat digunakan sebagai pengganti Pajak Penjualan. Pasalnya, Pajak Penjualan dinilai sudah tak mencukupi lagi menampung aktivitas rakyat dan belum memenuhi kebutuhan pembangunan seperti menghasilkan pendapatan negara, mendorong ekspor & mendistribusikan beban pajak secara merata. Menurut pasal 1 angka 3 dan 3 UU No 8 PPN Tahun 1983 BKP, yang mengatakan bahwa pengertian barang kena pajak adalah suatu barang bergerak atau tidak bergerak maupun barang kena pajak tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Jenis barang bergerak adalah suatu barang yang penggunaanya dapat dipindahkan.

Namun sedangkan barang tidak bergerak ialah jenis barang yang tidak dapat dipindah tempatkan. Sementara pada barang kena pajak PPN tidak berwujud merupakan barang yang tidak dapat dilihat dan tidak memiliki wujud secara fisik. Sedangkan barang yang berwujud adalah barang yang dapat dilihat maupun dirasakan secara fisik. Biasanya jenis perpajakan ini dikenakan pada pihak yang menjual yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun apabila penjual belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka barang yang dijual tidak dikenakan pajak. Sehingga pihak yang menanggung pajak adalah pihak pembeli. Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan rumus P**erhitungan DPP x Tarif PPN 11 %**. P

Perhitungan harga pokok produksi sangat mempengaruhi penetapan harga jual suatu produk sekaligus penetapan laba yang diinginkan. Dengan demikian ketepatan dalam melakukan perhitungan dalam harga pokok produksi harus diperhatikan, karena apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan keugian bagi perusahaan. Harga pokok produk yang diproduksi atau harga pokok produksi (cost of goods manufactured) menurut Mulyadi (2018). Metode Harga Pokok Pesanan (job order cost method) Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisahkan identitasnya.

Pengolahan produk akan dimulai setelah datangnya pesanan dari langganan/pembeli melalui dokumen pesanan penjualan (sales order), yang memuat jenis dan jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima dan harus diserahkan Supriyono (2015;36). Hal lain yang berkaitan mengenai biaya produksi Menurut Mulyadi (2015:14) biaya produksi adalah biaya – biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produksi jadi yang siap dijual. Sedangkan menurut Mulyadi (2015: 13-17), Biaya Overhead Pabrik adalah biaya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk lebih mudah mengilustrasikan masalah yang diteliti & menganalisanya dengan mendalam Proses pengumpulan datanya dilaksanakan dengan cara:

Pada proses pelaksanaan dokumentasi di lingkungan Perusahaan . data yang digunakan dipenelitian ini ialah dengandata sekunder, yang disatukan guna diolah lebih lanjut agar hasil studi jadi lebih akurat. Data yang didapat dipenelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan Laporan Keuangan CV.Graphic Electric Bekasi. Jawa Barat.

Penerapan pada pelaksanaan akuntansi dan perpajakan yang diaplikasikan pada Perusahaan, Wajib pajak mesti mengerti tentang perpajakan sebagai alat analisis yang bisa memprediksi potensi pajak dimasa depan, itulah fungsi akuntansi dan pajak. Perlunya perusahaan agar lebih mendalami pelaksanaan sistem akuntansi, supaya dalam aktifitas operasional bisa dijalankan secara teratur & tanpa kendala. Pelaksanaan akuntansi diaplikasikan supaya bisa mengurangi potensikesalahan, hingga informasi yang didapatkan akurat, tepat, bisa dipercaya untuk pihak yang berkepentingan.

HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh para peneliti dimulai dengan menyebutkan fakta obyektif, dengan melihat proses transaksi, mulai dari menerima pesanan dari klien, pembuatan pesanan, dan membuat faktur penjualan. Transaksi dimulai dari penerimaan pesanan dari klien, atau calon pedagang yang menawarkan barang kepada masyarakat umum. Analis juga memperhatikan proses penanganan permintaan, mulai dari menyiapkan materi utama termasuk merencanakan permohonan kesepakatan. Ketika produk telah dikirim atas permintaan klien, dengan disertai nota pengiriman, interaksi pertukaran telah dikenali. Sebagai elemen yang mendistribusikan produk pembeli, organisasi juga bertanggung jawab untuk membayar kembali pengembalian transaksi yang diberikan oleh klien.

Gambar 1.
Proses Bisnis Perusahaan
Bagan Proses CV.Graphic Electric

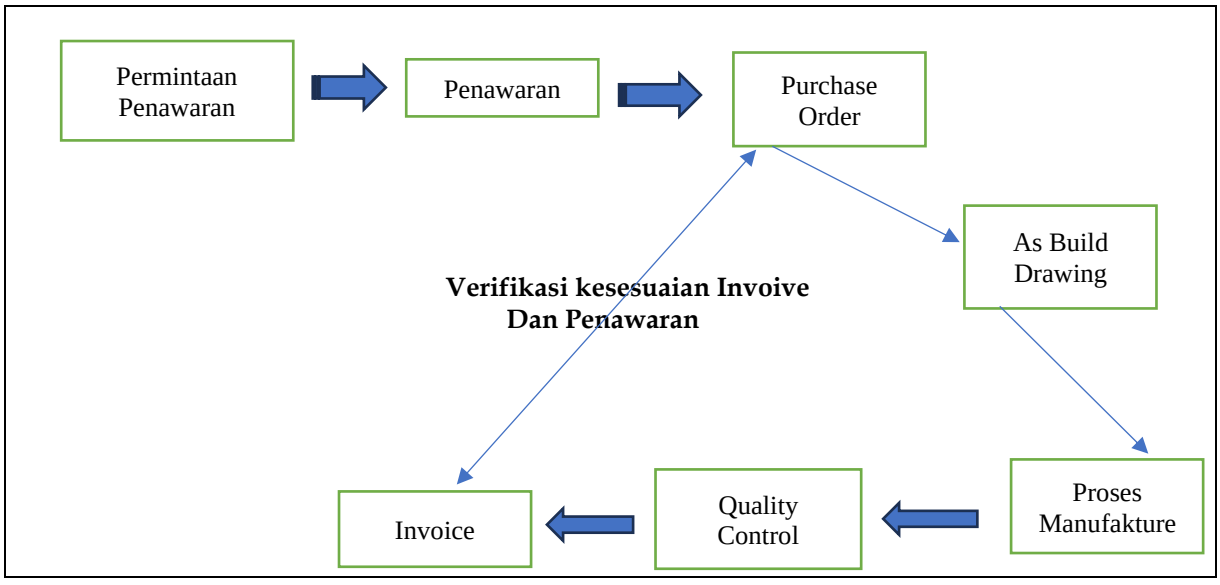

Langkah dalam proses produk diantaranya :

1. Pihak konsumen mengajukan permintaan penawaran harga &disertai gambar produk dan standar kuanlitas produk.
2. Perusahaan memberi penawaran harga produk denganmengirimkan Drawingproduk sesuai spesifikasi &standar permintaan konsumen disertai informasi target penyelesaian pada pihak konsumen.
3. Pembuatan purchase order (PO) atau kontrak.
4. Harga produk belum termasuk PPN. Harga produk atau harga jual diperoleh dari harga pokok penjualan (HPP) ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan prosespenyerahan barang atau jasa kena pajak.Jika melihat berdasarkan Undang- Undang Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak.
5. Data Purchase Order Box Panel Stenlisdan data kebutuhan matrial dan biaya Pada CV. Graphic

Electrik untuk memproduksi 100 unit Box panel.

Tabel 2 Jenis Produk

Nama Item/Type	QTY	Spek Material	Dimension
Box Panel (WM)	100 unit	Stelis(SUS) 2.00 mm 304	800 x600x 250 mm

Tabel 3 Kebutuhan dan Biaya Bahan Baku utama dan penolong untuk 100 unit Box

Bahan Baku	Spek Matrial	Qty	Satuan	Harga/Pcs/ unit	Total Harga
Plat 1200 x 2400	HL Sus 304	70	Lembar	Rp.2.700.000	Rp.189.000.000
Bahan Penolong					
Kunci Bulat	HL Sus 304	300	pcs	120.000	36.000.000
Engsel	HLSus 304	200	pcs	80.000	16.000.000
Engsel Hitam kecil	Besi Crome	200	Pcs	20.000	4.000.000
Gasket	Type D	100	Lot	100.000	10.000.000
Baut Hexa M8 x 35 mm	HL Sus 304	400	Set	5.000	2.000.000
Baut Hexa M6 x 16 mm	HL Sus 304	200	Set	2.500	500.000
Baut Hexa M5 x 15 mm	HL Sus 304	1000	Set	1.500	1.500.000
Plat 5 mm	Hl Sus 304	1	Lot	4.000.000	4.000.000
Jumlah					**Rp.263.000.000**

Pada table 3 menampilkan total nilai pembelian bahan baku senilai Rp.263.000.000 dan Perusahaan mendaptakan faktur pembelian dari semua matrial senilai Rp.Rp.28.930.000.

Tabel 4 Biaya Tenaga Kerja langsung 100 unit

Tenaga Kerja langsung	Jumlah	Upah perjam/set/Borongan	Durasi waktu	Hari/Jam	Jumlah Biaya
JasaLaser	-	Lot	-	-	Rp.10.000.000
Bending	2	35000	4	Hari	280.000
Welder	1	700000	-	Borongan	70.000.000
Finishing	2	25000	5	Hari	250.000
Instalment	4	20000	4	Hari	320.000
Jumlah					**Rp.80.850.000**

Pada table 3 menunjukkan nilai total biaya Tenaga kerja langsung sebesar Rp.80.850.000 termasuk upah Borongan 100 unit box panel

Tabel 5 Biaya Overhead Pabrik

BOP	Qty	Pemakaian	Satuan	Harga	Total Harga
CO2	100	5	Tabung	Rp250.000	Rp.1.250.000
Kawat Herlen	100	5	Kg	100.000	500.000
Ultraflex	100	3	Tube	250.000	750.000
Poles Herlen	100	20	Pcs	20.000	400.000
Scott gret	100	10	Pcs	12.000	120.000
Majun	100	30	Kg	10.000	300.000
Cutting	100	2	Dus	100.000	200.000
Jumlah					**Rp.3.520.000**

Pada table 4 Total Biaya Overhead Pabrik sebesar Rp3.520.000. Ditambah Biaya Listrik yang tercantum dalam table 5

Tabel 6
Biaya Listrik

Biaya Listrik	Biaya Perbulan	Pemakaian	Satuan	Biaya Perhari	Total Biaya
Biaya Listrik	3000000	10	Hari	80.000	Rp.800.000
Biaya Telpon/Internet	400000	10	Hari	20.000	Rp.200.000
Jumlah					**Rp.1000.000**

Tabel 7 Rekapitulasi Biaya Bahan Baku dan Biaya Overhead

Keterangan		
Biaya Bahan Baku Utama		Rp.189.000.000
Biaya Tenaga Kerja Langsung		Rp. 80.850.000
BIAYA OVERHEAD		
Biaya Bahan Penolong	Rp.74.000.000	
Biaya Listrik Dan Telepon	Rp. 1.000.000	
Biaya Overhead	Rp. 3.520.000	
Biaya Depresiasi Alat Kerja	Rp. 1.100.000	
TOTAL BIAYA OVERHEAD		Rp. 79.520.000
TOTAL BIAYA PRODUKSI		**Rp.349.370.000**

table 6. menunjukkan angka total biaya produksi Rp.349.370.000 dan Perusahaan memberlakukan total harga jual untuk 100 unit box panel sebesar Rp.6.500.00 x 100 unit panel =Rp.650.000.000.

PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Data yang didapati peneliti dari CV Graphic Electric, bisa diamati sejumlah transaksi yang ada diproduksi Box panel Stenlis di bulan Juli tahun 2022. Berapa PPN yang harus dibayar disebut PPN masukan, sedangkan PPN yang dikumpulkan disebut PPN keluaran. Perusahaan akan mengerjakan PPN dengan kecepatan 11% sesuai Peraturan HPP yang berlaku signifikan pada 1 April 2022. Tingkat hasil dikumpulkan oleh CV.Graphic Electric saat menawarkan produk elektronik kepada pembeli sebesar11%. Setiap kali Barang Kena Pajak dijual, faktur pajak dibuat dan disimpan dalam arsip.

Perhitungan untuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Keluaran Sbb.

PPN Keluaran= DPP x 11%

Dasar Pengenaan Pajak(DPP) = Harga Penjualan : 11.1

Sedangkan Untuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masukan Sbb.

PPN Masukan= DPP x 11 %

Dasar Pengenaan Pajak(DPP) = Harga Pembelian : 11.1

Atas dasar rumus Pajak Pertambahan Nilai yang di jelaskan diatas maka untuk aplikasi tarif PPN yang diterapkan pada Transaksi di CV.Graphic Electric dapat dijelaskan pada tabel sbb:

Tabel 8
Dasar Pengenaan Pajak

Transaksi	DPP	PPN Keluaran	PPN Masukan	Lebih/Kurang Bayar
Pembelian Bahar Baku	Rp.263.000.000		Rp.28.930.000	
Penjualan Box Panel	Rp.650.000.000	Rp.71.500.000		**Rp.42.570.000**

Pada table 7 dapat disimpulkanbahwa terjadi transaksi pembelian dan penjualan yang mana PPN masukan sebesar Rp.28.930.000 dapat mengurangi jumlah PPN Keluaran Rp.71.500.000 sehingga PPN yang terutang sebesar Rp.42.570.000 . Hal ini dijelaskan pada perhitungan berikut.

PPN Masukan Pembelian Bahan Baku
DPP=11 % x Rp.263.000.000
PPN Masukan= Rp.28.930.000

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas ialah.

Pembelian Rp.263.000.000
PPN Masukan Rp.28.930.000
Kas Rp.291.930.000

PPN Keluaran Pada penjualan Box Panel
DPP=11% x Rp.650.000.000
PPN Keluaran 11 % = Rp.71.500.000

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas

Kas Rp.721.500.000
Penjualan Rp.650.000.000
PPN Keluaran Rp. 71.500.000

PENUTUP

Berdasarkan pengamatan dan observasi di CV Graphic Electric, perusahaan dianggap memahami gagasan tentang PPN masukan & keluaran. Penerapan TKDN belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang ada,karena masih bersifat sukarela bagi Perusahaan swasta. Penerapan TKDN seharusnya dibarengi dengan perlakuan PPN atas barang/jasa yang mengandung TKDN persentase nya tinggi. Program yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan akuntansi dan perpajakan. Penerapan pajak kepada CV Graphic Electric seperti faktur pajak & penjualan adalah sesuai pengaturan biaya yang ada. Pemeriksaan ini dibatasi hanya pada satu transaksi pada bulan Juli 2022. Dalam proses studi dan pengamatan, secara umum tidak akan ada kesalahan / PPN masukan yang batal / gagal. Sehubungan dengan ide untuk organisasi, mereka perlu memperbaiki kualitas pelaporan akuntansi & perpajakan yang ada, dengan memperbaiki dan menyegarkan desain pencatatan mereka, sehingga kesalahan tidak terjadi pada saat digunakan. Organisasi juga perlu menyelesaikan pengaturan pembuatan tugas untuk Pajak Pertambahan Nilai.

REFERENSI

Agus Suprijono. (2015). Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Angelia Anita Kusumasari1), Lusy2)* ANALISIS AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS PROSES PENJUALAN PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AIR MINERAL DI SURABAYA Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(02), 2022, p.1-8

Carl S.Warren, James M Reeve, Philip E Feess. 2014. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia (Berbasis PSAK terbaru) Edisi 25. Salemba Empat. Jakarta

Fadhlurrahmah Santoso1, Jullie J. Sondakh2, Natalia Y.T Gerungai3 ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. EMIGAS SEJAHTERA Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 819-829

Mardiasmo. 2019. Perpajakan.Yogyakarta: Andi.

Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Peloporan PPN atas Belanja BKP pada CV. Timur Jaya. Jurmal Aplikasi Perpajakan,

Mulyadi. 2001. "Akuntansi Manajemen (Konsep, Manfaat, dan Rekayasa)". Salemba Empat:Jakarta.

Mulyadi. 2005."Akuntansi Biaya". Edisi ke-5 Cetakan ke-8 AdityaMedia.Yogyakarta.

Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Purnairawan, Eddy dan Sunarno Sastroatmodjo. 2021. Pengantar Akuntansi. Bandung: CV. MEDIAN SAINS INDONESIA

Rati Naila Romana1, Timbul Simangunsong2, Saprudin3 ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 04, No. 02, Januari 2023

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Yenni Biringa, Ferlia Dwiyanti Saruran b, Lisa Payung c, Aun Palebangan d enerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ. Jurnal Ilmiah akuntansi AKUNTANSI'45 Vol 4 No. 1 Mei 2023.